

	News Title : Pemerintah Kuatkan Regulasi dan Pembinaan Ekosistem Aset Kripto	
	Media Name : disway.id	Journalist : Ruslan
	Publish Date : 07 April 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 1,500,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Bisnis	Topic : kripto

Pemerintah Kuatkan Regulasi dan Pembinaan Ekosistem Aset Kripto

Reporter: Ruslan | Editor: Ruslan | Jumat 07-04-2023,18:50 WIB



Pemerintah kuatkan regulasi dan pembinaan ekosistem aset kripto--Bappebti--

JAKARTA, RADARTASIK.COM – Perkembangan perdagangan aset [kripto](#) di Indonesia didukung penguatan regulasi dan pembinaan ekosistem yang terus mengalami perbaikan.

Hingga saat ini [Bappebti](#) (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) telah memberi izin 28 perusahaan calon pedagang fisik [aset kripto](#).

Hal itu dikatakan Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko dalam peluncuran PT Sentra Bitweve Indonesia di Holland Village, Jakarta, Kamis 6 April 2023.

"Masyarakat dapat bertransaksi aset kripto melalui 28 perusahaan yang telah mengantong izin dari Bappebti. Sehingga, ini sudah jelas legalitasnya. Jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan ada 383 dan diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022," jelas dia lagi.

BACA JUGA: [Real Madrid Ingin Barter Brahim Diaz dengan Penyerang AC Milan](#)

Dalam peluncuran awal PT Sentra Bitweve Indonesia yang merupakan karya anak bangsa tersebut, Bappebti menunjukkan dukungan pemerintah terhadap industri kripto.

PT Sentra Bitweve Indonesia diharapkan dapat melayani nasabah pada Mei 2023.

Didid menambahkan Bappebti merupakan salah satu Unit Eselon I [Kementerian Perdagangan](#) yang memiliki tanggung jawab dalam pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) di Indonesia.

Perdagangan fisik aset kripto menjadi salah satu bagian dari perdagangan berjangka yang diawasi Bappebti.

BACA JUGA: [KOMENTAR, Harapan dan Doa Bobotoh untuk Persib Membuat Merinding dan Terharu: 'Persib Juara di Hati...'](#)

Hal ini berlaku sejak disahkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

"Perdagangan berjangka merupakan bisnis yang saat ini berkembang, sangat kompleks dan memiliki sifat high risk high return sehingga diperlukan tata kelola dan pengaturan yang baik," kata dia.

"Perdagangan berjangka juga perlu diatur dalam rangka melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal serta memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi semua pihak yang terlibat," tambah Didid.

Menurut dia, menghadapi tantangan teknologi rantai blok (blockchain), aset kripto dinilai dapat memengaruhi sektor [keuangan](#).

BACA JUGA: Hasil Klarifikasi DPRD Kota Tasikmalaya ke Dirjen Dikti, STMIK Tasikmalaya Sudah Di-Warning dari 2018

Untuk itu, pada tahun ini telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor [Keuangan](#) (UU P2SK).

Keberadaan UU P2SK ini memiliki tujuan yang forward looking, mengantisipasi risiko masa depan, perlindungan konsumen/investor.

Beberapa ruang lingkup yang diatur dalam UU ini antara lain penguatan kelembagaan sektor keuangan; penguatan tata kelola keuangan; dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan; perlindungan konsumen; serta literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, peran [Bappebti](#) dalam tata kelola perdagangan aset [kripto](#) akan berpindah menjadi kewewenangan Otoritas Jasa Keuangan ([OJK](#)) dengan masa transisi 2 tahun.

BACA JUGA: Mantan Presiden Inter Milan Bocorkan Calon Pemilik Nerazzurri Berasal dari Italia Setelah Dikuasai China

Melihat peminat [aset kripto](#) yang terus meningkat serta perkiraan berakhirnya crypto winter pada 2024, pemerintah harus optimistis perdagangan [aset kripto](#) akan semakin berkembang.

Melalui UU P2SK, diharapkan koordinasi dan penguatan peran kementerian dan lembaga terkait dalam mengatur penyelenggaraan perdagangan aset kripto menjadi lebih baik.

"Masih berkaitan dengan UU P2SK, Bappebti akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai amanat UU Nomor 4 Tahun 2023. Penyusunan RPP khususnya terkait masa transisi pengalihan pengawasan derivatif keuangan dan aset kripto," ungkap Didid.

Perkembangan Perdagangan Aset Kripto di Indonesia

BACA JUGA: 2 Jalur Alternatif di Tasikmalaya Minim Penerangan, Hati-hati Mudik Lebaran 2023 saat Perjalanan Malam

Dinamika perdagangan fisik aset kripto mengalami pasang surut sejak beberapa tahun terakhir.

Nilai transaksi pada 2022 sempat menurun, namun pada Februari 2023 tercatat Rp 13,8 triliun atau naik 13,7 persen dibandingkan Januari 2023 (MoM).

Secara total, nilai transaksi periode Januari – Februari 2023 sebesar Rp 25,94 triliun atau turun 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2022 sebesar Rp 83,76 triliun.

Awal 2022 dan diperkirakan sampai dengan 2023, dunia masih mengalami fase crypto winter. Artinya, penurunan transaksi perdagangan aset kripto terjadi hampir sepanjang tahun.

BACA JUGA: [Bintang AC Milan Bandingkan Pelecehan Rasis yang Didapat Ibrahimovic dan Lukaku](#)

Sebaliknya, dari sisi jumlah pelanggan terjadi penambahan cukup signifikan. Pada Februari 2023, tercatat jumlah pelanggan 17 juta (rata-rata penambahan sebesar 500 ribu pelanggan per bulan) dari tahun sebelumnya sebesar 16 juta.

Dari sisi penguatan ekonomi nasional, perdagangan aset [kripto](#) memberikan manfaat terutama melalui kontribusinya dalam penerimaan negara melalui pajak.

Pada periode Mei – Desember 2022 berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian [Keuangan](#) telah terkumpul pajak atas perdagangan fisik [aset kripto](#) sebesar Rp 246,5 miliar.